



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 28 April 2020

Halaman: 9

JADUP BELUM JUGA CAIR

Kinerja Gugus Tugas Terlalu Birokratis

YOGYA (KR) - Komisi B DPRD DIY menilai kinerja Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di DIY terlalu birokratis. Salah satu buktinya, belum turunnya bantuan sosial (bansos) atau jadup yang dijanjikan pemerintah.

Contoh lain, baru dicairkannya dana Rp 9 miliar oleh tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Padahal sejak awal sudah disebutkan ada anggaran Rp 579 miliar yang akan disiapkan oleh Pemda DIY untuk menangani Covid-19 ini.

"Ini hanya dikarenakan kemauan untuk kecepatan eksekusi saja. Karena saat rapat dengan tim Gugus

Tugas, ada beberapa keputusan yang diambilnya itu ada birokrasi. Sebelum eksekusi anggaran itu harus ada rekomendasi," ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY Dwi Wahyu saat jumpa pers, Senin (27/4).

Hal lain yang mengesankan kinerja Gugus Tugas Penanganan Covid-19 ini adalah, antarOPD itu belum satu tema. Padahal un-

tuk menangani ini harus ada kerja sama. Meskipun akhirnya melakukan sendiri-sendiri, namun tema besarnya itu harus disamakan terlebih dahulu.

Melihat perkembangan dari Covid-19 ini, menurut Dwi, membutuhkan penanganan serius. Terutama dari sisi kesehatan dan ekonomi. Mengenai jadup, memang datanya harus valid terlebih dahulu. Baru setelahnya anggaran bisa cair. Pihaknya yakin Pemda DIY memiliki anggaran. Apalagi ini sudah masuk tanggap darurat. "Masa untuk Rp 200 miliar atau Rp 300 miliar ti-

dak ada? Dan kenapa juga sudah 40 hari tanggap darurat berjalan, dana yang dicairkan baru Rp 9 miliar?" ucapnya.

Dicontohkan, kemarin dari Pemda DIY akan membeli komoditas laut nelayan untuk selanjutnya diolah menjadi makanan.

"Dari UMKM sudah siap, tapi di perjalanan tidak tereksekusi. Padahal itu menjadi bagian dari isian jadup," tegas Dwi.

Mengenai data penerima jadup yang cenderung berubah-ubah juga mendapat perhatian dari Ketua Komisi B DPRD DIY

Danang Wahyu Broto. Sebelumnya dari Dinas Sosial menyatakan, ada 76.261 KK penerima jadup. Namun ada koreksi menjadi 42.360 KK karena ada *overlap*. Mereka yang sudah termasuk dalam penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Kita dorong jadup segera disalurkan ke masyarakat. Apalagi status tanggap darurat sudah berjalan satu bulan lebih dan akan segera berakhir pada 29 Mei nanti. Masyarakat juga menanti," ungkapnya.

(Awh/Bro)-o

Instansi	Tindak Lanjut
.....	☐ Untuk Data
.....	☐ Untuk Data
.....	☐ Jumpa Pe

.....ta,
Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005